# PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
## (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)

**Oleh:**
**Chintiya Devi Rustiana**
**(Chintya_devi33@yahoo.com)**
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
**Universitas Komputer Indonesia**

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the influence of internal control and apparatus competence on the quality of local government financial statements Bandung. Respondents taken in this study SKPD head of Bandung as much as 67 SKPD. Questionnaires were distributed as many as 67 questionnaires. Questionnaires are returned 67 and included in data processing. The method used in this research is descriptive and verifikatif with quantitative approach. Sources of data in this study is primary data with data collection techniques conducted by survey method using questionnaires. The analysis method used in this research is Structural Equation Modeling (SEM) through Partial Least Square (PLS) approach using SmartPLS 3.0 software. The results of this study indicate that Internal Control affects the Quality of LKPD with a contribution of 34,5%, Competence Apparatus to LKPD Quality of 23,1%.*

***Keywords: Internal Control, Competence Apparatus, Quality of Local Government Financial Statement.***

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik, secara umum pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hokum dan undang-undang di wilayah tertentu, yang disebut pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Deddi, Ayuningtyas, 2014:49). Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit yang dilakukan pemerintah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. (Armando, 2013). Menurut PSAP 01 paragraf 13, tanggung jawab penyusunan laporan keuangan berada pada pimpinan entitas, dalam pemerintah daerah yang dimaksud pimpinan entitas adalah setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (Mursydi, 2013:63). Aparatur tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya tetapi prilaku dan sikap juga menjadi aspek yang harus diperhatikan, biasanya setiap aparatur yang terdidik biasanya diikuti oleh sikap dan perilaku yang terdidik pula,walaupun hal itu bukan menjadi jaminan tetapi ada proses pendidikan dan pembinaan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik secara formal yang berhubungan dengan kompetensinya maupun secara informal yang berhubungan dengan aspek kognitifnya (Wibowo, 2016:180).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, Kota Bandung masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum menunjukan hasil yang maksimal seperti banyaknya opini BPK yang menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih terdapat opini disclaimer, permasalahan masih di dominasi terkait asset tetap tanah yang dimiliki pemda yang masih belum bersertifikat, hal ini menjadikan kualitas laporan keuangan menurun, serta masih begitu banyak ditemukan ketidak patuhan aparatur seperti pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau BUD, selain itu sejumlah persoalan perlu mendapat perhatian supaya kualitas tata kelola keuangan lebih baik (Arman Syifa, 2016). Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

## 1.2 Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2) Seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Pengendalian Intern

#### 2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Hery (2013:159):

"Pengendalian intern adalah kebijakan atau prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan(peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan".

#### 2.1.1.2 Indikator Pengendalian Intern

Menurut Hery (2013:90) indikator pengendalian interen meliputi :

1) Kebijakan
2) Melindungi Aset
3) Penyalahgunaan
4) Informasi
5) Akurat
6) Ketentuan Undang-undang

### 2.1.2 Kompetensi Aparatur

#### 2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur

Menurut Wibowo (2012:324):

"Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut".

#### 2.1.2.2 Indikator Kompetensi Aparatur

Adapun yang menjadi indikator kompetensi aparatur menurut Wibowo (2012:320), yaitu:

1) Pengetahuan
2) Keterampilan
3) Perilaku

### 2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### 2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina, dkk (2015:19):

Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya".

#### 2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Erlina, dkk (2015:8), yaitu:

1) Andal
2) Relevan
3) Dapat dipahami
4) Dapat dibandingkan

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mengkaitkan tujuan pengembangan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian intern yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawban dan perlindungan kekayaan perusahaan, Mulyadi (2010:19).

### 2.2.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ada terdapat hubungan terkait antara kompetensi aparatur dan kualitas laporan pemerintah daerah, jadi apabila tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah atau tidak bisa memberikan pelayanan perizinan dengan baik itu karena pegawainya kurang kompeten, M. Yusuf (2013:154).

## 2.3 Hipotesis

$H_1$: Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_2$: Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

# METEDOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Metedologi Penelitian Yang Digunakan

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Tujuan dan kegunaan penelitian yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan, Sugiyono (2015:2).

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, Sugiyono (2014:13).

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, Sugiyono (2014:22).

## 3.2 Oprasional Variabel

Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor, Umi Narimawati, dkk. (2010:31).

Variabel Independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), Sugiyono (2013:39). Dalam penelitian ini variabel bebas/variabel independen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu variabel ($X_1$) adalah pengendalian intern dan ($X_2$) kompetensi aparatur.

Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, Sugiyono (2014:39). Dalam penelitian ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah variabel (Y) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh pengendalian intern dan kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## 3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

### 3.3.1 Sumber Data

Sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner pada seluruh Dinas yang ada pada Kabupaten Bandung Barat dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, Sugiyono, (2010:137).

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, Sugiyono (2015:193).

1. Penelitian Lapangan
   Metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada proses berlangsung pembelajar berada langsung di lapangan, Nigel Bevan dan Tomer Sharon (2009).
2. Studi Kepustakaan
   Mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti, Jonathan Sarwono (2006: 26).

### 3.4 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2015:117). Populasi dalam penelitian ini adalah 67 Kepala SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bandung.

*Sampling* jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, Sugiyono (2015:118). Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa *sampling* jenuh atau sensus teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Peneliti mengambil jumlah sampel yang sama dengan jumlah populasi yaitu 67 Kepala SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bandung.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggumpulkan data primer dengan menggunakan kuisioner, data yang diperoleh dari para responden maka perlu dilakukan uji keabsahannya. Untuk itu menguji kesungguhan jawaban responden diperlukan dua macam pengujian yaitu *test of validity* dan *test of reability.*

Valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti, Sugiyono (2015:174).

Merupakan derajat ketepatan, ketelitian atau akurasi yang ditujukan oleh instrument yang reliable berarti instrument tersebut bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama, suatu kuesioner dikatakan reliable (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengujian reliabilitas ini dilakukan terhadap butir-butir pernyataan (kuesioner) dengan melihat nilai r (alpha) pada table reliabilitas data, Priyono (2016:92).

### 3.6 Metode Pengujian Data

Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti, Umi Narimawati (2010:41).

### 3.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, Sugiyono (2015:114).

$H_0$1 ; γ1.1 = 0, Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah.

$H_1$1 ;γ1.1 ≠ 0, Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah.

$H_0$2 ;γ2.1 = 0, Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah

$H_1$2 ;γ2.1 ≠ 0, Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah.

Kriteria Pengujian :

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ (1,960) maka H0 ditolak, berarti Ha diterima.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang disebar kepada 67 Kepala SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bandung. Dalam variabel Pengendalian Intern terdiri dari 9 item pernyataan, variabel dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terdiri dari 5 item pernyataan dan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari 7 item pernyataan.

### 4.2 Pembahasan

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang disebar kepada 67 Kepala SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bandung. Dalam variabel Pengendalian Intern terdiri dari 9 item pernyataan, variabel dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terdiri dari 5 item pernyataan dan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari 7 item pernyataan.

Pada bagian pembahasan ini, akan dijelaskan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 4.2.1 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung}$ sebesar 4,161 lebih besar dari $t_{tabel}$ (1,960) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator melindungi aset dengan persentase 65,37% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 34,63%. Selain itu pada indikator penyalahgunaan dengan presentase 62,99% tergolong dalam kategori cukup,

#### 4.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Kuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung}$ sebesar 3,343 lebih besar dari $t_{tabel}$ (1,960) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bandung.Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator pengetahuan dengan persentase 61,04% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup, namun terdapat *gap* sebesar 38,96%. Selain itu pada indikator perilaku dengan presentase 60,45% tergolong dalam kategori cukup, dan terdapat gap sebesar 39,55%. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh sebesar 23,1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,716 yang berarti kompetensi aparatur pemerintah memberikan pengaruh yang kuat dengan arah positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD kota Bandung. Dengan kategori korelasi kuat, yang artinya semakin baik pengendalian intern maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun ada beberapa yang menyebabkan pengendalian intern belum maksimal yaitu kurang mendukungnya perlindungan asset, adanya penyalahgunaan, dan kurangnya informasi yang memadai serta kurangnya ke akuratan. Dan berimbas pada pengendlian intern yang kurang baik/maksimal. Pada penelitian ini pengendalian intern yang terjadi pada SKPD kota Bandung berada dalam kriteria cukup baik, tetapi hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada pengendalian intern.

Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD kota Bandung. Dengan kategori korelasi kuat atau erat, yang artinya semakin tinggi kompetensi aparatur pemeirntah maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun ada yang menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah belum maksimal yaitu kurang pengetahuan dan perilaku. Sehingga penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah kurang baik. Dan berimbas pada kompetensi aparatur pemerintah yang kurang baik/maksimal. Pada penelitian kompetensi aparatur pemerintah pada SKPD kota Bandung berada dalam kriteria cukup baik, tetapi hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada kompetensi aparatur pemerintah.

## 5.2 Saran

Pihak SKPD sebaiknya lebih melindungi aset yang dimiliki dengan cara mendorong pemerintah kota mempercepat penuntasan sertifikasi aset daerah,sebab dokumen legal tersebut akan melindungi Pemerintah Kota dari sengketa kepemilikan aset. Melindungi aset juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaiknya setiap pegawai SKPD lebih berusaha meningkatkan pengetahuan dan perilaku yang berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**-DAFTAR PUSTAKA**


Adi Prasetyo, A. E. Priyono, Olle Tornquist (dkk), *Indonesia's Post Soeharto Democracy Movement*, Demos Publication, Jakarta, 2003

Armando, Gerry. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah*. Artikel Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang.

BPK RI. 2015. *Penyampaian LHP BPK RI atas LKPD TA 2015: BPK RI berikan opini WTP untuk Pemprov Jabar dan Pemkot Banjar*, dari http://bandung.bpk.go.id/web/?p=3932

Bastian,Indra. 2006.Audit sektor Publik.Jakarta: Salemba Empat.

*Darmadi*, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta. Deliarnov. 2003. Perkembangan Pemikiran Ekonomi.

David W. Cravens & Nigel Piercy (2009). Strategec Marketing. New York: Mc Graw Hill.

Erlina, dkk. 2015, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Penerbit: Brama Ardian.

Hery. 2013. Akuntansi Dasar 1 dan 2. CAPS. Jakarta.

Herry. 2013. Auditing (pemeriksaan Akuntansi I). Cetakkan Pertama, Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/07/058777694/ini-hasil-auditkeuangan-kota-bandung-oleh-bpk

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta :Graha Ilmu

Mahmudi. 2012. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Empat.

Mahmudi. 2013. Akuntansi Sektor Publik,Yogykarta:IUU press Yogyakarta.

Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mashuri. 2008*. Penelitian Verifikatif. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.*

Moeheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

M.Yusuf. 2013. Sumber Daya Aparatur. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Empat.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.CV. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2013. Metode penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alpabeta

Sugiyono.2014.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sinambela, Lijan Poltak. 2014. Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran, dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Suwanda, Dadang,. Dan Susanto, Hendri. 2014. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAK. Bandung: PT Remaja.

Surtisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: KENCANA.

Suwardjono, 2005 "Akuntansi Pengantar". Yogyakarta : BPFE

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati. 2007. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi : Genesis

Umi Narimawati dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Genesis.

Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja, (Edisi Kettiga). Jakarta: Rajawali Pers.

## LAMPIRAN TABEL-TABEL

**Tabel 3.1**
**Operasionalisasi Variabel**

| Variabel | Konsep Variabel | Indikator | Skala | No. Kuesioner |
|---|---|---|---|---|
| Pengendalian Intern<br><br>(X1) | Pengendalian intern adalah kebijakan atau prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan(peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan<br><br>Hery (2013:159) | 1. Kebijakan<br>2. Melindungi Aset<br>3. Penyalahgunaan<br>4. Informasi<br>5. Akurat<br>6. Ketentuan Undang-undang<br><br>Hery (2013:90) | Ordinal | 1-2<br>3-4<br><br>5<br>6<br>7<br>8-9 |
| Kompetensi Aparatur ($X_2$) | Kompetensi aparatur adalah Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut<br><br>Wibowo(2012:324) | 1. Pengetahuan<br>2. Keterampilan<br>3. Perilaku<br><br>Wibowo(2012:320) | Ordinal | 10-11<br>12<br>13-14 |
| Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah<br><br>(Y) | Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya<br><br>Erlina, dkk (2015:19) | 1. Andal<br>2. Relevan<br>3. Dapat dipahami<br>4. Dpat dibandingkan<br><br>Erlina, dkk (2015:8) | Ordinal | 15-17<br>18-19<br>20<br><br>21 |

**Tabel 3.2**
**Skala Rating Scale**

| Keterangan | Skor Positif | Skor Negatif |
|---|---|---|
| Sangat Setuju | 5 | 1 |
| Setuju | 4 | 2 |
| Ragu-Ragu | 3 | 3 |
| Tidak Setuju | 2 | 4 |
| Sangat Tidak Setuju | 1 | 5 |

**Tabel 3.3**
**Kriteria Penilaian *Response Rate***

| No | *Response Rate* | Kriteria |
|---|---|---|
| 1 | ≥ 85% | *Excellent* |
| 2 | 70% - 85% | *Very Good* |
| 3 | 60% - 69% | *Acceptable* |
| 4 | 51% - 59% | *Questionable* |
| 5 | ≤ 50% | *Not Scientifically Acceptable* |

Sumber: Yang dan Miller (2008:231)

**Tabel 3.4**
**Daftar SKPD Pemerintah Kota Bandung**

| SKPD | Jumlah |
|---|---|
| Badan Daerah Kota Bandung | 5 |
| Dinas Daerah Kota Bandung | 22 |
| Kecamatan Daerah Kota Bandung | 30 |
| Sekretaris Kota Bandung | 10 |
| **Total SKPD** | **67** |

**Tabel 3.6**
**Standar Penilaian Validitas**

| Kategori | Nilai |
|---|---|
| *Good* | 0,50 |
| *Acceptable* | 0,30 |
| *Margin* | 0,20 |
| *Poor* | 0,10 |

Sumber: Barker et al. (2002:70)

**Tabel 3.7**
**Standar Penilaian Reabilitas**

| Kategori | Nilai |
|---|---|
| *Good* | 0,80 |
| *Acceptable* | 0,70 |
| *Margin* | 0,60 |
| *Poor* | 0,50 |

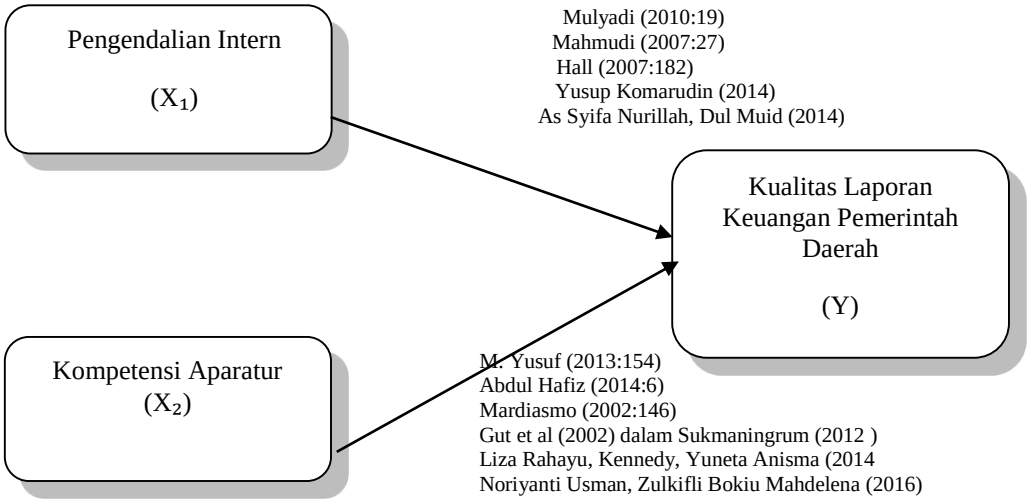
Sumber : Barker et al. (2002)

**Tabel 3.8**
**Kriteria Presentase Tanggapan Responden**

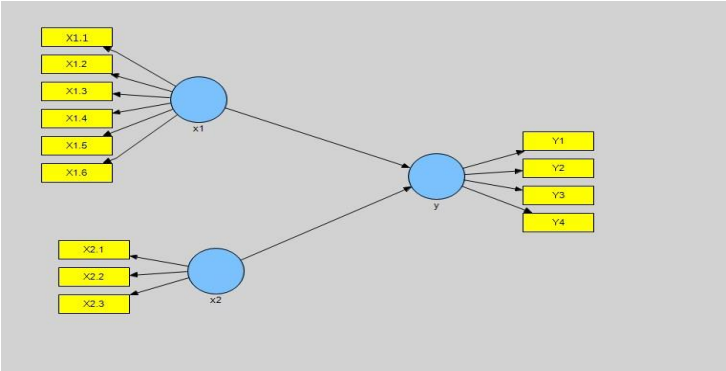
| NO | Jumlah Skor (%) | Kriteria |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 % - 36.00 % | Tidak Baik |
| 2 | 36.01 % - 52.00 % | Kurang Baik |
| 3 | 52.01 % - 68.00 % | Cukup |
| 4 | 68.01 % - 84.00 % | Baik |
| 5 | 84.01 % - 100 % | Sangat Baik |

Sumber: Umi Narimawati (2010:87)

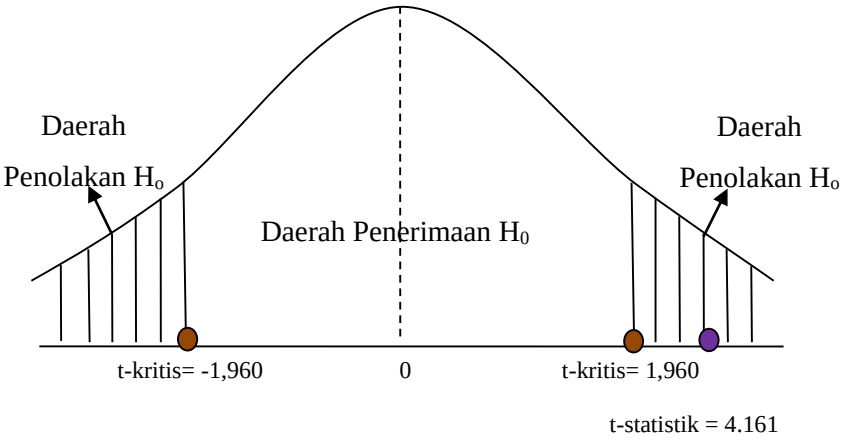
Lampiran Gambar



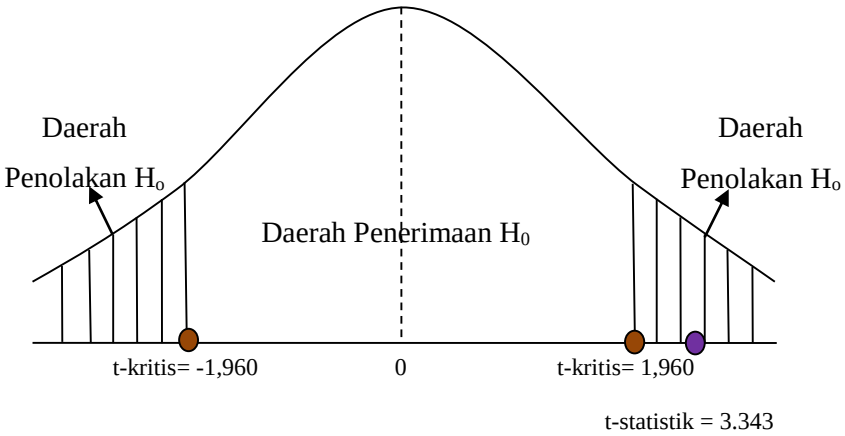

**Gambar 2.1**
**Pradigma Penelitian**




**Gambar 4.2**
**Diagram Jalur Model Lengkap**




**Gambar 4.4**
**Kurva Uji Hipotesis Variabel $X_1$ terhadap Y**




**Gambar 4.5**
**Kurva Uji Hipotesis Variabel $X_2$ terhadap Y**